

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan peraturan mengenai penyelenggaraan pelayanan publik wajib disesuaikan dengan Undang-Undang terbaru yaitu Nomor 25 tahun 2009 yang mengatur tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang pelayanan publik ini sendiri diterbitkan dengan harapan mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan terjaminnya kepastian hak dan kewajiban serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Undang-Undang pelayanan publik ini juga memberikan sanksi bagi pelaksana dan penyelenggara pelayanan publik yang tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Istilah “ sektor publik “ itu sendiri memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal itu dikarenakan dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap ilmu (ekonomi, politik, hukum, dan sosial) memiliki sudut pandang dan definisi yang berbeda-beda (Mardiasmo 2004:2). Seharusnya tugas utama pemerintah sebagai organisasi sektor publik terbesar yaitu untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu konsep yang sangat diperlukan dan di butuhkan. Kesejahteraan masyarakat tidak hanya dilihat dari kesejahteraan fisik yang bersifat material saja, namun termasuk nonfisik yang bersifat immaterial.

Dewasa ini, Kinerja instansi pemerintah menjadi sorotan dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik.

Masyarakat sering menilai organisasi sektor publik sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi. Masyarakat yang semakin cerdas dan kritis juga menuntut dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga yang terkait dengan sektor publik. Tuntutan masyarakat ini sesuai dengan UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999 yang digunakan sebagai suatu dasar bagi serangkaian reformasi kelembagaan dalam menciptakan *good government*, yaitu pemerintah yang bersih, ekonomis, efektif, transparan, responsif, dan akuntabel.

Menurut Mahmudi (2007:58) Pengukuran kinerja merupakan suatu bagian dari fungsi pengendalian manajemen karena pengukuran kinerja itu sendiri dapat digunakan untuk melakukan pengendalian aktivitas. Sedangkan, Menurut Mardiasmo (2004:121) pengukuran kinerja organisasi sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Ada beberapa alat dalam pengukuran kinerja menurut mardiasmo (2004:122), antara lain menggunakan metode *Balance Score Card* dan metode *Value for Money*. Dalam metode *Balance Score Card* terdapat empat perspektif yang dinilai yaitu perspektif keuangan (*financial*), perspektif konsumen (*customer*), perspektif proses bisnis (*internal*), dan perspektif pembelajaran dan

pertumbuhan (*growth and learn*), sedangkan metode *value for money* terdapat tiga elemen utama yang dinilai yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Menurut penelitian terdahulu oleh Isna Ardila dan Ayu Anindya Putri bahwasannya pengukuran kinerja bisa dikatakan ekonomi, efisiensi dan efektivitas apabila dalam rasio penilaiannya mengalami peningkatan yang rata-rata diatas 100%. Dengan peningkatan tersebut menunjukan bahwa kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sudah terpenuhi dengan baik.

Dalam *Value for money*, pengukuran kinerja merupakan inti pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi *output* yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan *input*, *output*, dan *outcome* secara bersama-sama. Menurut Mahumudi (2007:81) *Value for Money* adalah konsep penting dalam organisasi sektor publik. *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan pada elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi berarti pemerolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Efisiensi berarti pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu, sedangkan efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *Value for Money*, yaitu: ekonomi (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisiensi (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektivitas (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Dari ketiga elemen pokok *Value for Money* tersebut, beberapa pihak berpendapat bahwa tiga elemen saja belum cukup

(Mardiasmo,2004:127). Perlu ditambah dua elemen lain yaitu keadilan (*equity*) dan pemerataan atau kesetaraan (*equality*). Keadilan berarti bahwa semua masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan, tanpa diskriminasi atau hak istimewa bagi kelompok tertentu. Pemerataan atau kesetaraan berarti pemerintah harus menerapkan pemerataan pelayanan kepada seluruh masyarakat, dengan mengutamakan pelayanan bagi masyarakat yang lebih membutuhkan.

Manfaat *value for money* pada organisasi sektor publik menurut Mardiasmo (2004:7) antara lain :

1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik
3. Menurunkan biaya pelayanan publik karena efisiensi dan penghematan *input*
4. Alokasi belanja yang berorientasi pada kepentingan publik
5. Meningkatkan kesadaran atas penggunaan uang publik, demi akuntabilitas.

Di Kabupaten Sampang sendiri, sektor pertanian merupakan salah satu andalan dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya. Sesuai dengan kekhasan dan kondisi alam yang ada, Kabupaten Sampang memiliki potensi cukup besar untuk mengembangkan potensi sumber daya dalam hal pertanian, sehingga Dinas Pertanian Kabupaten Sampang selaku organisasi sektor publik yang menangani masalah pertanian di Kabupaten Sampang telah menetapkan program untuk mendukung perkembangan pertanian tersebut. Program-program yang dibuat sesuai dengan misi Dinas Pertanian Kabupaten Sampang yaitu, meningkatkan profesionalitas aparatur

Dinas Pertanian, peningkatan produksi pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani, meningkatkan pemanfaatan teknologi yang mendorong pertambahan nilai potensi wilayah dengan arah kebijakan, dengan cara meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian melalui intensifikasi, perbibitan, diversifikasi dan penyediaan alsintan serta perbaikan infrastruktur pertanian.

Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Pertanian Kabupaten Sampang belum dapat bekerja secara maksimal karena banyaknya hambatan yang dihadapi dan masih cukup banyak keluhan yang disampaikan para petani di Kabupaten Sampang, seperti yang tertera pada artikel Korankabar.com (SAMPANG) Minggu pada tahun 2016, disebutkan bahwa penyaluran bantuan alat mesin pertanian (alsintan) di Kabupaten Sampang, kerap menimbulkan permasalahan. Bantuan yang diberikan untuk kesejahteraan petani itu, tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna. Salah satu buktinya adalah jenis pertanian yang diberikan selalu menoton, yakni handtractor dan mesin pompa air.

Berdasarkan tujuan Dinas Pertanian Kabupaten Sampang yang memberikan pelayanan di bidang pertanian, munculnya beberapa permasalahan dan keluhan ini mengidentifikasi bahwa pelayanan yang diberikan Dinas Pertanian Kabupaten Sampang belum memenuhi kepuasan yang diharapkan sehingga perlu perhatian khusus. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dengan melakukan pengukuran kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Sampang. Dinas Pertanian Kabupaten Sampang memerlukan adanya pengukuran kinerja untuk mengetahui kinerja secara keseluruhan dalam melaksanakan program kerjanya. Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Sampang sering dinilai hanya dari aspek *input* dan *output*. Instansi ini dinilai cukup berhasil jika bisa menyerap anggaran 100% (*input*) dan melaksanakan program tahunan (*output*), tanpa ada penilaian

terhadap aspek hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan juga dampak (*impact*). Oleh karena itu diperlukan ukuran nonfinansial dalam pengukuran kinerja organisasi sektor publik.

Melalui pengukuran kinerja dengan konsep *value for money* diharapkan Unit Pelaksanaan teknis Dinas Pertanian Kabupaten Sampang dapat melayani masyarakat dengan sebaik mungkin. Program-program yang telah direncanakan dapat berlangsung dengan baik sehingga masyarakat yang berada di Kabupaten Sampang khususnya para petani dapat merasakan manfaatnya dan Unit Pelaksana Teknis dinas Pertanian Kabupaten Sampang dapat mencapai tujuannya untuk melayani petani-petani yang berada di Kabupaten Sampang dengan baik.

Dengan memperhatikan kinerja pemerintah yang menjadi sorotan dan juga permasalahan pertanian di Kabupaten Sampang, maka penulis tertarik untuk mengemukakan masalah dalam menganalisis kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Sampang menggunakan metode *Value for Money*. Semua masalah inilah yang menjadi latar belakang penulisan tugas akhir, sehingga penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengukuran Kinerja Melalui Metode *Value for Money* di Dinas Pertanian Kabupaten Sampang Periode Tahun 2013-2015”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Sampang periode tahun 2013-2015 ditinjau dari elemen ekonomi?
2. Bagaimana kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Sampang periode tahun 2013-2015 ditinjau dari elemen efisiensi?
3. Bagaimana kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Sampang periode tahun 2013-2015 ditinjau dari elemen efektivitas?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Sampang periode tahun 2013-2015 ditinjau dari elemen ekonomi.
2. Mengetahui kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Sampang periode tahun 2013-2015 ditinjau dari elemen efisiensi.
3. Mengetahui kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Sampang periode tahun 2013-2015 ditinjau dari elemen efektivitas.

1.4 Manfaat Penelitian

Sebagaimana telah dikemukakan dalam masalah serta tujuan dari penulisan tugas akhir ini, maka manfaat yang diharapkan dari penulis ini adalah:

a) Manfaat bagi pembaca

Memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ranah akuntansi sektor publik yang berkaitan dengan

pengukuran kinerja dengan analisis metode *Value for Money* dan sebagai referensi bagi peneliti lain yang berkeinginan melakukan penelitian sejenis.

b) Manfaat bagi peneliti

Hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam menerapkan ilmu yang telah dipelajari khususnya mengenai akuntansi sektor publik.

c) Manfaat bagi Dinas Peratanian Kabupaten Sampang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sekaligus umpan balik mengenai pengukuran kinerja dinas Pertanian Kabupaten Sampang sehingga dalam melaksanakan program/ kegiatan di masa yang akan datang supaya dapat berjalan secara ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

1.5 Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi yang dipilih oleh peneliti untuk melakukan penelitian adalah di Dinas Pertanian Kabupaten Sampang yang beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 59 Kabupaten Sampang, yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2017 – 24 Februari 2017.